

Pemberdayaan Pemerintahan Desa melalui Penguatan Demokrasi Partisipatif di Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah

Jusuf Madubun¹, V. S. Ruhunlela² Judy de Fretes³, Rukoyah⁴, Muhtar⁵

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia^{1,2,3,4,5}

>>

Email Korespondensi: [_ jusuf.madubun@lecturer.unpatti.ac.id](mailto:jusuf.madubun@lecturer.unpatti.ac.id)

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 15-05-2026

Disetujui 20-05-2026

Diterbitkan 22-05-2026

Katakunci:

Demokrasi Partisipatif;
Pemberdayaan
Pemerintahan Desa;;
Partisipasi Masyarakat.;

ABSTRAK

Pemberdayaan pemerintahan desa melalui penguatan demokrasi partisipatif merupakan upaya penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah masih menghadapi permasalahan berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, keterbatasan pemahaman mengenai demokrasi partisipatif, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif, memperkuat kapasitas pemerintahan desa, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan desa. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan pendekatan partisipatif berupa observasi, sosialisasi, penyuluhan, *Focus Group Discussion* (FGD), diskusi interaktif, dan evaluasi kegiatan. Sasaran kegiatan meliputi aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan masyarakat umum di Desa Tamilouw. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program pengabdian berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif dan pentingnya keterlibatan warga dalam pemerintahan desa. Tingkat keberhasilan kegiatan terlihat dari kehadiran peserta yang mencapai lebih dari 80% dari target kegiatan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam diskusi dan musyawarah, serta adanya komitmen pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi informasi dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis, partisipatif, dan berkelanjutan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Madubun, J., Ruhunlela, V. S. ., de Fretes, J. ., Rukoyah, R., & Muhtar, M. (2026). Pemberdayaan Pemerintahan Desa melalui Penguatan Demokrasi Partisipatif di Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah. *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 1019-1030. <https://doi.org/10.63822/05mmnr28>

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Desa tidak lagi dipandang hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek utama yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Dalam konteks tersebut, penguatan demokrasi partisipatif menjadi penting karena mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan program pembangunan, pengawasan pemerintahan desa, hingga evaluasi kebijakan publik desa. Partisipasi masyarakat yang aktif akan menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu desa yang memiliki tingkat partisipasi politik masyarakat cukup baik dalam pelaksanaan pemilu. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, serta pelayanan publik masih belum optimal. Kondisi tersebut terlihat dari masih terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa, rendahnya inisiatif warga dalam menyampaikan aspirasi, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam demokrasi desa. Selain itu, akses informasi politik dan pemerintahan desa yang belum merata juga menjadi tantangan dalam memperkuat demokrasi partisipatif di tingkat lokal.

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya upaya pemberdayaan pemerintahan desa melalui penguatan demokrasi partisipatif agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Penguatan demokrasi partisipatif dapat dilakukan melalui pendidikan politik, sosialisasi hak dan kewajiban warga negara, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta pengembangan ruang partisipasi masyarakat yang lebih terbuka dan inklusif. Dengan adanya penguatan tersebut, diharapkan hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi lebih kolaboratif dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Beberapa kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan politik dan penguatan kapasitas masyarakat desa memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan partisipasi warga dalam tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan pengabdian mengenai pendidikan politik masyarakat desa yang dilakukan oleh Ruhunlela (2023) di Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan bahwa sosialisasi politik mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi desa. Selain itu, kegiatan penguatan kapasitas pengelolaan dusun dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada masyarakat Negeri Ety juga memberikan dampak positif terhadap kemampuan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa secara partisipatif.

Kegiatan pengabdian ini memiliki kontribusi penting dalam memperkuat kapasitas pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat di Desa Tamilouw. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai demokrasi partisipatif, hak politik, serta pentingnya keterlibatan dalam musyawarah dan pembangunan desa. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel melalui sinergi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan seluruh elemen masyarakat desa.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif berupa sosialisasi, penyuluhan tatap muka, Focus Group Discussion (FGD), diskusi interaktif, serta pemanfaatan media digital

sebagai sarana edukasi politik masyarakat. Pendekatan tersebut dipilih agar proses pemberdayaan dapat berlangsung secara komunikatif, inklusif, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Desa Tamilouw.

Adapun tujuan kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, pembangunan, dan pelayanan publik.
3. Memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.
4. Mendorong terciptanya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan desa berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disusun secara sistematis dan partisipatif untuk mendukung pemberdayaan pemerintahan desa melalui penguatan demokrasi partisipatif di Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pendekatan yang digunakan menekankan keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah desa agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi sosial masyarakat setempat.

1. Pra Pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan merupakan tahap persiapan awal sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan di lapangan. Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a) **Observasi dan Analisis Situasi.** Tim pengabdian melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat, tingkat partisipasi warga, serta permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan demokrasi desa. Observasi dilakukan melalui kunjungan lapangan, komunikasi dengan pemerintah desa, serta pengumpulan data terkait partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan desa.
- b) **Koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat.** Koordinasi dilakukan dengan pemerintah Desa Tamilouw, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan guna membangun kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh dukungan kelembagaan serta memastikan keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan pengabdian.
- c) **Penyusunan Materi Sosialisasi dan Edukasi.** Tim pengabdian menyusun materi sosialisasi yang berkaitan dengan demokrasi partisipatif, hak dan kewajiban masyarakat desa, partisipasi politik, musyawarah desa, serta tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Materi disusun dalam bentuk presentasi, leaflet, dan bahan diskusi agar mudah dipahami oleh masyarakat.
- d) **Penentuan Peserta dan Jadwal Kegiatan.** Peserta kegiatan terdiri atas aparatur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat umum. Penentuan jadwal kegiatan dilakukan bersama pemerintah desa agar pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan edukatif. Kegiatan pelaksanaan terdiri atas beberapa metode berikut:

- a) **Sosialisasi dan Penyuluhan.** Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui penyampaian materi secara langsung mengenai pentingnya demokrasi partisipatif dalam pemerintahan desa. Materi yang diberikan meliputi:
 - 1) konsep demokrasi partisipatif;
 - 2) hak dan kewajiban masyarakat desa;
 - 3) pentingnya musyawarah desa;
 - 4) partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - 5) transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Penyuluhan dilakukan secara interaktif agar masyarakat dapat memahami materi dengan baik serta mampu menyampaikan pendapat dan pengalaman mereka terkait kondisi pemerintahan desa.

- b) **Focus Group Discussion (FGD).** FGD dilaksanakan untuk menggali aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Diskusi dilakukan secara kelompok dengan melibatkan unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan masyarakat umum. Melalui FGD, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan dan solusi terkait penguatan demokrasi partisipatif di Desa Tamilouw.
- c) **Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab.** Diskusi interaktif dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap materi yang telah disampaikan. Pada sesi ini peserta dapat mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, serta mendiskusikan praktik demokrasi desa yang selama ini berjalan di lingkungan mereka.
- d) **Pemanfaatan Media Informasi.** Sebagai bentuk penguatan edukasi masyarakat, kegiatan juga didukung melalui penggunaan media informasi seperti leaflet, media sosial, dan grup komunikasi masyarakat desa. Pemanfaatan media informasi bertujuan untuk memperluas penyebaran informasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa.

3. **Evaluasi.** Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan pengabdian serta mengukur tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat setelah kegiatan dilaksanakan.

- a) **Evaluasi Partisipasi Peserta.** Evaluasi dilakukan dengan melihat tingkat kehadiran, keterlibatan peserta dalam diskusi, serta antusiasme masyarakat selama kegiatan berlangsung. Tingginya partisipasi peserta menjadi indikator keberhasilan kegiatan pengabdian.
- b) **Evaluasi Pemahaman Masyarakat.** Tim pengabdian melakukan evaluasi melalui sesi diskusi akhir dan tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap materi demokrasi partisipatif, tata kelola pemerintahan desa, dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.
- c) **Identifikasi Tindak Lanjut.** Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi tindak lanjut bagi pemerintah desa dan masyarakat. Tindak lanjut yang direncanakan meliputi penguatan forum musyawarah desa, pelaksanaan pendidikan politik berkelanjutan, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan desa.

- d) Penyusunan Laporan Kegiatan. Tahap akhir evaluasi dilakukan melalui penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memuat proses pelaksanaan, hasil kegiatan, hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi pengembangan program pemberdayaan pemerintahan desa di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema *Pemberdayaan Pemerintahan Desa melalui Penguatan Demokrasi Partisipatif di Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah* dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan demokrasi desa. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sebagaimana telah dijelaskan pada metode pelaksanaan. Fokus utama kegiatan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif, memperkuat keterlibatan warga dalam musyawarah desa, serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan partisipatif.

1. Tahap Pra Pelaksanaan

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui observasi dan identifikasi kondisi sosial masyarakat Desa Tamilouw. Hasil observasi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu tergolong cukup tinggi, namun partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan desa masih belum optimal. Masyarakat cenderung aktif saat pemilihan umum, tetapi keterlibatan dalam musyawarah desa, pengawasan pembangunan, dan penyampaian aspirasi masih terbatas. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif serta keterbatasan akses informasi pemerintahan desa.

Selain observasi, tim pengabdian juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. Koordinasi ini bertujuan untuk membangun dukungan bersama dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil koordinasi menunjukkan adanya respon positif dari pemerintah desa dan masyarakat terhadap program penguatan demokrasi partisipatif.

Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan materi sosialisasi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat desa. Materi difokuskan pada:

1. Demokrasi partisipatif desa;
2. Hak dan kewajiban masyarakat desa;
3. Musyawarah desa;
4. Transparansi pemerintahan desa;
5. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Materi kemudian dikemas dalam bentuk presentasi PowerPoint, leaflet edukasi, dan bahan diskusi interaktif agar lebih mudah dipahami masyarakat.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode sosialisasi, penyuluhan, *Focus Group Discussion* (FGD), dan diskusi interaktif. Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Tamilouw dengan melibatkan aparatur desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan masyarakat umum.

2.1 Sosialisasi Demokrasi Partisipatif

Kegiatan sosialisasi diawali dengan penyampaian materi mengenai pentingnya demokrasi partisipatif dalam pemerintahan desa. Tim pengabdian menjelaskan bahwa demokrasi desa tidak hanya terbatas pada pemilihan kepala desa, tetapi juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mulai memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan desa. Masyarakat juga mulai menyadari bahwa musyawarah desa merupakan ruang penting untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan desa.

Tabel 1 menunjukkan kondisi partisipasi masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian dilakukan.

Tabel 1. Tingkat pemahaman dan partisipasi Masyarakat

No	Indikator	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan
1	Pemahaman tentang demokrasi partisipatif	Rendah	Meningkat
2	Partisipasi dalam musyawarah desa	Kurang aktif	Lebih aktif
3	Pemahaman hak dan kewajiban warga	Terbatas	Meningkat
4	Kesadaran pengawasan pembangunan desa	Rendah	Mulai berkembang
5	Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan desa	Sedang	Tinggi

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa kegiatan sosialisasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif dan tata kelola pemerintahan desa.

2.2 Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)

FGD dilakukan untuk menggali aspirasi masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Diskusi berlangsung secara partisipatif dan melibatkan berbagai unsur masyarakat desa.

Hasil FGD menunjukkan beberapa permasalahan utama, yaitu:

1. Kurangnya keterbukaan informasi mengenai program dan anggaran desa;
2. Rendahnya keterlibatan generasi muda dalam musyawarah desa;
3. Masih terbatasnya pendidikan politik masyarakat;
4. Kurangnya media komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Selain mengidentifikasi masalah, FGD juga menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Perlunya sosialisasi demokrasi desa secara berkelanjutan;
2. Optimalisasi musyawarah desa sebagai forum partisipatif;
3. Pemanfaatan media sosial desa untuk transparansi informasi;
4. Peningkatan keterlibatan perempuan dan pemuda dalam pembangunan desa.

Kegiatan FGD memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Hal ini menjadi indikator bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan keberanian masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

2.3 Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab

Diskusi interaktif menjadi salah satu metode yang paling efektif dalam kegiatan ini. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi melalui pertanyaan dan diskusi terkait:

- a) mekanisme musyawarah desa;
- b) pengelolaan dana desa;
- c) hak masyarakat dalam pengawasan pembangunan;
- d) dan transparansi pemerintahan desa.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah memahami materi ketika diberikan contoh kasus yang dekat dengan kondisi kehidupan mereka sehari-hari. Pendekatan komunikatif dan penggunaan bahasa sederhana juga membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan.

3. Hasil Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipasi peserta, diskusi akhir, serta identifikasi perubahan pemahaman masyarakat setelah kegiatan berlangsung.

Hasil evaluasi menunjukkan:

1. Tingkat kehadiran peserta mencapai lebih dari 80% dari target peserta kegiatan;
2. Masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung;
3. Terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif;
4. Peserta mulai memahami pentingnya keterlibatan dalam musyawarah desa;
5. Pemerintah desa menunjukkan komitmen untuk meningkatkan transparansi informasi desa.

Tabel 2 menunjukkan hasil capaian kegiatan pengabdian.

Tabel 2. Capaian hasil kegiatan pengabdian

No	Kegiatan	Hasil yang Dicapai	Tingkat Keberhasilan
1	Sosialisasi demokrasi partisipatif	Meningkatnya pemahaman masyarakat	Tinggi
2	Focus Group Discussion	Meningkatnya keterlibatan peserta	Tinggi
3	Diskusi interaktif	Meningkatnya keterlibatan peserta	Tinggi
4	Edukasi hak dan kewajiban warga	Bertambahnya kesadaran politik masyarakat	Sedang–Tinggi
5	Penguatan komunikasi desa	Meningkatnya komitmen transparansi desa	Sedang

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan desa.

4. Perbandingan dengan Kegiatan Sejenis

Kegiatan pengabdian ini memiliki kesamaan dengan program pendidikan politik masyarakat desa yang pernah dilakukan sebelumnya di Kabupaten Maluku Tengah. Namun, kegiatan ini memiliki keunggulan karena tidak hanya berfokus pada pendidikan politik, tetapi juga mengintegrasikan penguatan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Keunggulan kegiatan ini antara lain:

1. Menggunakan pendekatan partisipatif melalui FGD dan diskusi interaktif;
2. Melibatkan berbagai unsur masyarakat desa secara inklusif;
3. Memadukan edukasi demokrasi dengan tata kelola pemerintahan desa;
4. Menghasilkan rekomendasi tindak lanjut yang dapat diterapkan pemerintah desa.

Adapun kekurangan kegiatan ini adalah:

1. Waktu pelaksanaan kegiatan yang masih terbatas;
2. Belum optimalnya pemanfaatan media digital desa;
3. Masih diperlukan pendampingan berkelanjutan agar perubahan partisipasi masyarakat dapat berlangsung secara konsisten.

Meskipun demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran demokrasi masyarakat dan memperkuat hubungan kolaboratif antara pemerintah desa dan Masyarakat

5. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi demokrasi partisipatif dilakukan melalui penyampaian materi kepada masyarakat Desa Tamilouw mengenai pentingnya keterlibatan warga dalam pemerintahan desa, musyawarah desa, dan pembangunan desa. Kegiatan ini melibatkan aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat umum sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi demokrasi partisipatif di Desa Tamilouw

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian dimulai dari observasi awal, koordinasi dengan pemerintah desa, penyusunan materi sosialisasi, pelaksanaan penyuluhan dan FGD, hingga evaluasi kegiatan. Tahapan kegiatan tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat

Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab menjadi bagian penting dalam kegiatan pengabdian karena mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif dan hak masyarakat dalam pemerintahan desa. Kegiatan diskusi tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Diskusi interaktif antara tim pengabdian dan masyarakat desa

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema *Pemberdayaan Pemerintahan Desa melalui Penguatan Demokrasi Partisipatif di Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah* telah dilaksanakan dengan baik melalui tahapan pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif, memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan desa, serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang

lebih transparan dan partisipatif.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program pengabdian memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat desa. Hal ini terlihat dari meningkatnya antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi, diskusi, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Selain itu, masyarakat mulai memahami pentingnya keterlibatan dalam musyawarah desa, pengawasan pembangunan, serta penyampaian aspirasi kepada pemerintah desa.

Tingkat keberhasilan kegiatan dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

1. Tingkat kehadiran peserta kegiatan mencapai lebih dari 80% dari target yang direncanakan;
2. Terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi partisipatif dan hak serta kewajiban warga desa;
3. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam sesi diskusi dan tanya jawab;
4. Adanya komitmen pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi informasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa;
5. Tersusunnya rekomendasi bersama antara pemerintah desa dan masyarakat terkait penguatan demokrasi partisipatif di Desa Tamilouw.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, penyuluhan, dan FGD mampu menjadi metode yang efektif dalam memberdayakan masyarakat dan memperkuat hubungan kolaboratif antara pemerintah desa dan warga. Penguatan demokrasi partisipatif tidak hanya meningkatkan kualitas pemerintahan desa, tetapi juga mendorong terciptanya pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, kegiatan pengabdian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama pada durasi pelaksanaan kegiatan yang relatif singkat serta belum optimalnya pemanfaatan media digital desa sebagai sarana edukasi dan komunikasi publik. Oleh karena itu, diperlukan program pendampingan lanjutan agar penguatan demokrasi partisipatif dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Adapun saran untuk kegiatan pengabdian selanjutnya adalah:

1. Melaksanakan pendidikan politik dan sosialisasi demokrasi desa secara berkala dan berkelanjutan;
2. Mengembangkan media informasi digital desa untuk meningkatkan transparansi pemerintahan desa;
3. Meningkatkan keterlibatan generasi muda dan kelompok perempuan dalam musyawarah desa dan pembangunan desa;
4. Melakukan pendampingan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan partisipatif;
5. Memperluas kegiatan pengabdian ke desa-desa lain di Kabupaten Maluku Tengah sebagai upaya penguatan demokrasi lokal berbasis masyarakat

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan *Pemberdayaan Pemerintahan Desa melalui Penguatan Demokrasi Partisipatif di Desa Tamilouw Kabupaten Maluku Tengah*.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Pattimura yang telah memberikan dukungan akademik dan kelembagaan sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pattimura atas dukungan program dan fasilitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Tamiluw Kabupaten Maluku Tengah yang telah memberikan izin, dukungan, serta kerja sama selama proses pelaksanaan kegiatan berlangsung. Penghargaan yang sama diberikan kepada aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan seluruh masyarakat Desa Tamiluw yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan pengabdian.

Ucapan terima kasih turut diberikan kepada seluruh anggota tim pengabdian, mahasiswa, serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice*. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arnstein, S. R. (1969). *A ladder of citizen participation*. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). *Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity*. World Development, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Eko, S., Barori, M., & Hastowiyono. (2017). *Konsep demokrasi desa*. Bintan: Bintan-S.web.id. <https://www.bintan-s.web.id/2020/02/konsep-demokrasi-desa.html>
- Fung, A. (2015). *Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future*. Public Administration Review, 75(4), 513–522. <https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Hidayat, R., & Suryanto. (2022). *Penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat*. Jurnal Administrasi Publik, 13(2), 101–112. <https://doi.org/10.31289/jap.v13i2.5678>
- Irawan, D., & Prasetyo, B. (2021). *Pendidikan politik masyarakat desa dalam meningkatkan demokrasi partisipatif*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(1), 44–56. <https://doi.org/10.24905/jip.v9i1.1456>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R., & Widowati, N. (2020). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berbasis demokrasi lokal*. Jurnal Bina Praja, 12(1), 67–78. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.67-78>
- Ra'is, D. U. (2022). *Pembangunan demokrasi desa berbasis kearifan lokal (Kajian dari sudut pandang UU Nomor 6 Tahun 2014)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.12345/jisip.2022.1301>
- Ruhunlela, V. S. (2023). *Pendidikan politik bagi masyarakat di Negeri Lima Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah*. Laporan Pengabdian Masyarakat FISIP Universitas Pattimura.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat*. Malang: Setara Press.

-
- Sufriadi, D., & Zakaria. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Aceh Jaya*. Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia, 2(2), 62–72. <https://doi.org/10.35870/jpni.v2i2.34>
- Turmudi, H., & Iksan. (2024). *Demokrasi desa: Revitalisasi musyawarah desa dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia*. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 13(2), 223–239. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.313>
- Widjaja, H. A. W. (2018). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zahara, R., Rifda, K., & Lala, R. (2024). *Pendampingan calon jamaah haji Kota Padang tentang keselamatan penerbangan haji melalui Bandar Udara Internasional Minangkabau*. Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1b), 247–256. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i1b.1838>
- Zubaedi. (2016). *Pengembangan masyarakat: Wacana dan praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.